

KONTRIBUSI FAKTOR PAD PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Ruslina¹

¹Fakultas Ekonomi, Manajemen

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia.

ruslina@untag-smd.ac.id

ABSTRAKSI

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Barat. Untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Barat. Untuk mengetahui kontribusi pengelolaan kekayaan daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Barat. Untuk mengetahui kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Barat.

Hasil perhitungan kontribusi margin di peroleh kesimpulan bahwa lain – lain PAD yang sah memiliki kontribusi terbesar dan berkontribusi secara signifikan. Persamaan regresi menyimpulkan apabila terjadi kenaikan pada variabel independen (X) yang terdiri dari variabel pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), pengelolaan kekayaan daerah (X_3) dan lain – lain PAD yang sah (X_4) akan menyebabkan kenaikan pada variabel dependen (Y) atau pendapatan asli daerah (PAD).

PENDAHULUAN

Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan

dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Kalimantan Timur. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya melalui pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan galian golongan C, pajak pengambilan sarang burung walet (SBW) dan retribusi daerah (retribusi kesehatan, retribusi biaya cetak KTP dan akte capil, retribusi paker, retribusi pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi IMB, retribusi izin gangguan HO, retribusi SIUP, retribusi TDP, retribusi pengambilan sarang burung walet).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul :

“Kontribusi Faktor – Faktor PAD Terhadap PAD Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat”

Rumusan Masalah

“Apakah penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Barat ?”

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Barat.
2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Barat.
3. Untuk mengetahui kontribusi pengelolaan kekayaan daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Barat.
4. Untuk mengetahui kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Barat.

Manfaat Penelitian

1. Instansi Pemerintahan, untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja keuangan instansi tersebut, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.
2. Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Samarinda khususnya Fakultas Ekonomi sebagai referensi terutama yang berkaitan dengan Manajemen Keuangan dan PAD.
3. Pembaca. Sebagai referensi penelitian lanjutan khususnya yang berminat melakukan penelitian tentang Manajemen Keuangan dan PAD.

DASAR TEORI

Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Smith, Jay M. Skouse. K Fred (2000 : 44) mengemukakan *financial management is concerned the acquisition, financing and management of assets with some overall goal in mind.*

Fungsi Manajemen Keuangan

Menurut Marihot Manullang dan Dearlina Sinaga (2005 : 2 -5) adapun fungsi manajemen keuangan adalah :

- a) Fungsi pengendalian likuiditas (*Function Leading to Liquidity*).
- b) Fungsi Pengendalian Laba (*Function Leading of Profitability*)

Tujuan Manajemen Keuangan

Menurut Kasmir (2010 : 13-14) manajemen keuangan memiliki tujuan melalui dua pendekatan :

- a. *Profit risk approach*, dalam hal ini manajer keuangan tidak hanya sekedar mengejar maksimalisasi profit, akan tetapi juga harus mempertimbangkan resiko yang bakal di hadapi.
- b. *Liquidity and profitability*, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana seorang manajer keuangan mengelola likuiditas dan profitabilitas perusahaan.

Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:1) mengemukakan pengertian Pajak:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Fungsi Pajak

Menurut Chidir Ali (1993 : 134-136) fungsi pajak memiliki dua macam fungsi, yaitu :

- a) Fungsi Budgetair
Fungsi budgetair, yaitu pajak yang dilaksanakan sejak permulaan

sejarahnya. Artinya, semenjak zaman purbakala pajak itu sudah merupakan sumber pendapatan negara yang utama.

b) Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend atau mengatur yaitu turut campurnya negara dalam membentuk kemakmuran masyarakat melalui pajak-pajak.

Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009 : 2-6) pengelompokan pajak dapat dibagi 3 yaitu :

1) Menurut golongannya

a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus di pikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat di bebaskan kepada orang lain.

Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Misalkan : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

Contoh : Pajak Penghasilan

b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh Pajak Pusat :

1) Pajak Penghasilan,

2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

3) Pajak Bumi dan Bangunan,

4) Bea Materai

b) Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

1) Pajak Propinsi, contoh :

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran, dan
- Pajak Hiburan

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009 : 7-8) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. *Official Assessment system* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Erly Suandi (2000 : 30-31) asas pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

a) Asas Domisili (asas tempat tinggal).

Dalam asas ini pemungutan pajak berdasarkan pada domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu negara.

b) Asas Sumber.

Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu negara.

c) Asas Kebangsaan (Nationaliteit)

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan/penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009 : 8-9) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Perlawanan pasif.
2. Perlawanan aktif.

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009 : 8-9) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Pemungutan pajak harus adil.
- b) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis).
- c) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
- e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Teori – teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009 : 3-4) ada beberapa teori untuk memungut pajak :

- 1) Teori Asuransi
- 2) Teori Kepentingan
- 3) Teori Daya Pikul
- 4) Teori Bakti
- 5) Teori Asas Daya Beli

Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2009 : 4) Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut :

- 1) Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- 2) Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Erly Suandi (2000 : 24-25) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

- 1) Stelsel Nyata (*rielt stelsel*).
- 2) Stelsel Fiktif (*fictieve stelsel*).
- 3) Stelsel Campuran.

Prinsip – prinsip Sistem Perpajakan Yang Baik

Menurut Liberty Pandiangan (2002 : 20-22) terdapat Sembilan prinsip utama dari suatu sistem perpajakan yang baik, yaitu :

- 1) Prinsip manfaat
- 2) Prinsip kemampuan membayar
- 3) Efisiensi
- 4) Pertumbuhan Ekonomi
- 5) Kecukupan Penerimaan.
- 6) Stabilitas.
- 7) Kesederhaan.
- 8) Rendahnya Biaya Administrasi dan Kepatuhan.
- 9) Netralitas.

Akibat - Akibat Ekonomi Pemungutan Pajak

Menurut Bohari (1993 : 116-117) ada dua akibat dengan dipungutnya pajak-pajak, yaitu :

- 1) Akan memperbesar pendapatan negara
- 2) Akan mengurangi dana (*money incomes*) yang tersedia dalam masyarakat.

Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada

Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Jenis – Jenis Pajak Daerah

Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 :

- 1) Pajak Propinsi, terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan dan kendaraan bermotor diatas air.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel.
 - b) Pajak Restoran.
 - c) Pajak Hiburan.
 - d) Pajak Reklame.
 - e) Pajak Penerangan Jalan.
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - g) Pajak Parkir.
 - h) Pajak Air Tanah.
 - i) Pajak Sarang Burung Walet.
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan.
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB).

Prinsip Pajak Daerah

Menurut Mahmudi (2009 : 21-22) prinsip pajak daerah tersebut adalah :

- 1) **Prinsip Elastisitas.**
- 2) **Prinsip Keadilan.**
- 3) **Prinsip Kemudahan Administrasi.**
- 4) **Prinsip Keberterimaan Politis.**
- 5) **Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian.**

Retribusi

Pengertian Retribusi

Menurut Bohari (1993:11) pengertian retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menggunakan jasa-jasa negara.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2009 : 15-16) jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- 1) Retribusi Jasa Umum
 - a) Retribusi pelayanan kesehatan
 - b) Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan
 - c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
 - d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e) Retribusi parkir ditepi jalan umum
 - f) Retribusi pasar
 - g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i) Retribusi biaya cetak peta
 - j) Retribusi pengujian kapal perikanan
- 2) Retribusi Jasa Usaha
 - a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
 - c) Retribusi tempat pelelangan
 - d) Retribusi terminal
 - e) Retribusi tempat khusus parkir
 - f) Retribusi tempat penginapan / pesanggarahan / villa
 - g) Retribusi penyedotan kakus
 - h) Retribusi rumah potong hewan
 - i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
 - j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - k) Retribusi penyebrangan diatas air
 - l) Retribusi pengolahan limbah cair
 - m) Retribusi penjualan produksi daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu
 - a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- b) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2009 : 16-17) objek Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Jasa Umum
- b. Jasa Usaha
- c. Perizinan Tertentu

Subjek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2009 : 17) subjek Retribusi Daerah sebagai berikut :

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Pengelolaan Kekayaan Daerah (Labanya Perusahaannya Milik Daerah)

Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap penerimaan PAD perlu dilakukan upaya peningkatan profesionalisme, efisiensi, profitabilitas, dan bahkan privatisasi perusahaan daerah.

Lain-lain PAD Yang Sah

Menurut Mahmudi (2009 : 26-27) pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain PAD yang Sah antara lain :

- Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa giro
- Pendapatan bunga
- Tuntutan Ganti Rugi
- Komisi
- Potongan
- Keuntungan selisih kurs
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- Pendapatan denda pajak dan retribusi
- Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum
- Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Bastian (2001 : 110) definisi PAD adalah :

“Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah pos penerimaan investasi pengelolaan sumber daya alam”

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Pengertian Kontribusi menurut Kamus Lengkap Ekonomi (Ahmad Antoni:85) memiliki pengertian sumbangan. Mengacu pada definisi tersebut, kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD memiliki pengertian sumbangsih yang diberikan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD.

Ruang Lingkup

Penelitian ini berjudul kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kab.Kutai Barat) yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kab.Kutai Barat yang terletak di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, Jl.Sendawar III Barong Tongkok Kab.Kutai Barat. Penelitian ini difokuskan pada pendapatan asli daerah periode tahun 2001 – 2011.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian / Studi Lapangan (*Field Work Research*)
 - a. Observasi
 - b. Interview
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
 - a. Dokumentasi
 - b. Bahan kumpulan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Rincian Data Yang Di Perlukan

- a. Gambaran umum Kab. Kutai Barat
- b. Gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kab.Kutai Barat
- c. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kab.Kutai Barat

- d. Data anggaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kab.Kutai Barat tahun 2001 s/d 2011
- e. Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kab.Kutai Barat tahun 2001 s/d 2011
- f. Penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kab.Kutai Barat Tahun 2001 s/d 2011
- g. Data lain pendukung penelitian ini.

Alat Analisis

- a. Kontribusi Margin menurut Mahmudi (2009 : 65) :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100 \% \\ & \frac{\text{Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100 \% \\ & \frac{\text{Pengelolaan Kekayaan Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100 \% \\ & \frac{\text{Lain – lain PAD yang Sah}}{\text{Total PAD}} \times 100 \% \end{aligned}$$

- b. Regresi Berganda menurut Agus Irianto (2003 : 193) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

HASIL PENELITIAN

Profil Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Kutai Barat dengan ibukota Sendawar memiliki luas wilayah daratan 31.628,70 km² dan mempunyai kemiringan lahan : datar (0 - 2%) seluas 322.753,25 km hektar, bergelombang (2 - 15%) seluas 190.603,63 hektar, sangat curam (> 40%) seluas 1.564.030,31 hektar. Kabupaten Kutai Barat memiliki ketinggian di atas permukaan laut 7 – 1.000 meter.

Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah yang disingkat Dispenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat yang menangani tentang Pendapatan Daerah, terutama mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut dari

masyarakat untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Adapun Susunan Organisasi :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - I. Sub Bagian Umum;
 - II. Sub Bagian Keuangan;
 - III. Sub Bagian Perencanaan Program;
- c. Bidang Pendataan :
 - I. Seksi Penatausahaan Data;
 - II. Seksi Pendataan;
- d. Bidang Penetapan :
 - I. Seksi Administrasi Perhitungan;
 - II. Seksi Penetapan;
- e. Bidang Penagihan :
 - I. Seksi Administrasi Penerimaan;
 - II. Seksi Penagihan dan Keberatan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

- a. Kontribusi Margin
 - o Penerimaan Pajak Daerah

$$\frac{44.900.342.191,59}{313.521.636.413,20} \times 100 \% = 14,3 \%$$
 - o Penerimaan Retribusi Daerah

$$\frac{76.376.310.571,81}{313.521.636.413,20} \times 100 \% = 24,4 \%$$
 - o Pengelolaan Kekayaan Daerah

$$\frac{30.685.030.944,41}{313.521.636.413,20} \times 100 \% = 9,8 \%$$
 - o Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

$$\frac{161.559.952.705,52}{313.521.636.413,20} \times 100 \% = 51,5 \%$$

- b. Regresi

$$Y = -0,720 + 0,002 X_1 + 0,276 X_2 + 0,061 X_3 + 0,488 X_4$$

Pembahasan

Kontribusi Margin Pajak Daerah sebesar 14,3 %, Retribusi Daerah sebesar

24,4 %, Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar 9,8 % dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 51,5 %. Kontribusi terbesar adalah Lain-lain PAD Yang Sah yaitu sebesar 51,5 % dan kontribusi terkecil adalah Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah 9,8%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Hasil perhitungan kontribusi margin di peroleh kesimpulan bahwa lain – lain PAD yang sah memiliki kontribusi terbesar dan berkontribusi secara signifikan.
- b. Persamaan regresi menyimpulkan apabila terjadi kenaikan pada variabel independen (X) yang terdiri dari variabel pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), pengelolaan kekayaan daerah (X_3) dan lain – lain PAD yang sah (X_4) akan menyebabkan kenaikan pada variabel dependen (Y) atau pendapatan asli daerah (PAD).

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat hendaknya lebih meningkatkan pendapatan variabel pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah agar variabel – variabel tersebut memberikan kontribusi secara signifikan.

2. Adanya variabel yang memiliki kontribusi terbesar yaitu variabel lain – lain PAD yang sah (Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak di Pisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Retribusi Perijinan Tertentu, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Pendapatan Lain – lain Yang Sah) yang di dapatkan instansi sehingga perlu oleh pihak instansi Dinas Pendapatan Daerah Kab.Kutai Barat untuk mempertahankan dan meningkatkan variabel tersebut